

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menetapkan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan 2017–2022. Kebijakan program dan kegiatan tersebut telah dijabarkan setiap tahun menjadi dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) sebagai pedoman dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahunan.

Pada tahun 2019, Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan program dan kegiatan strategis sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi. Berdasarkan tugas tersebut, Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan laporan kinerja yang memuat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2019.

Pertanggungjawaban kinerja merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang mewajibkan setiap instansi pemerintah harus melaporkan pencapaian kinerja atas kewenangan utamanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Proses penyusunan Laporan Kinerja memiliki dua fungsi utama. *Pertama* merupakan sarana bagi Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Gubernur. *Kedua*, merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Kedua fungsi utama ini merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja setiap Instansi Pemerintah.

I.2 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Provinsi Tahun 2019 berpedoman pada:

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

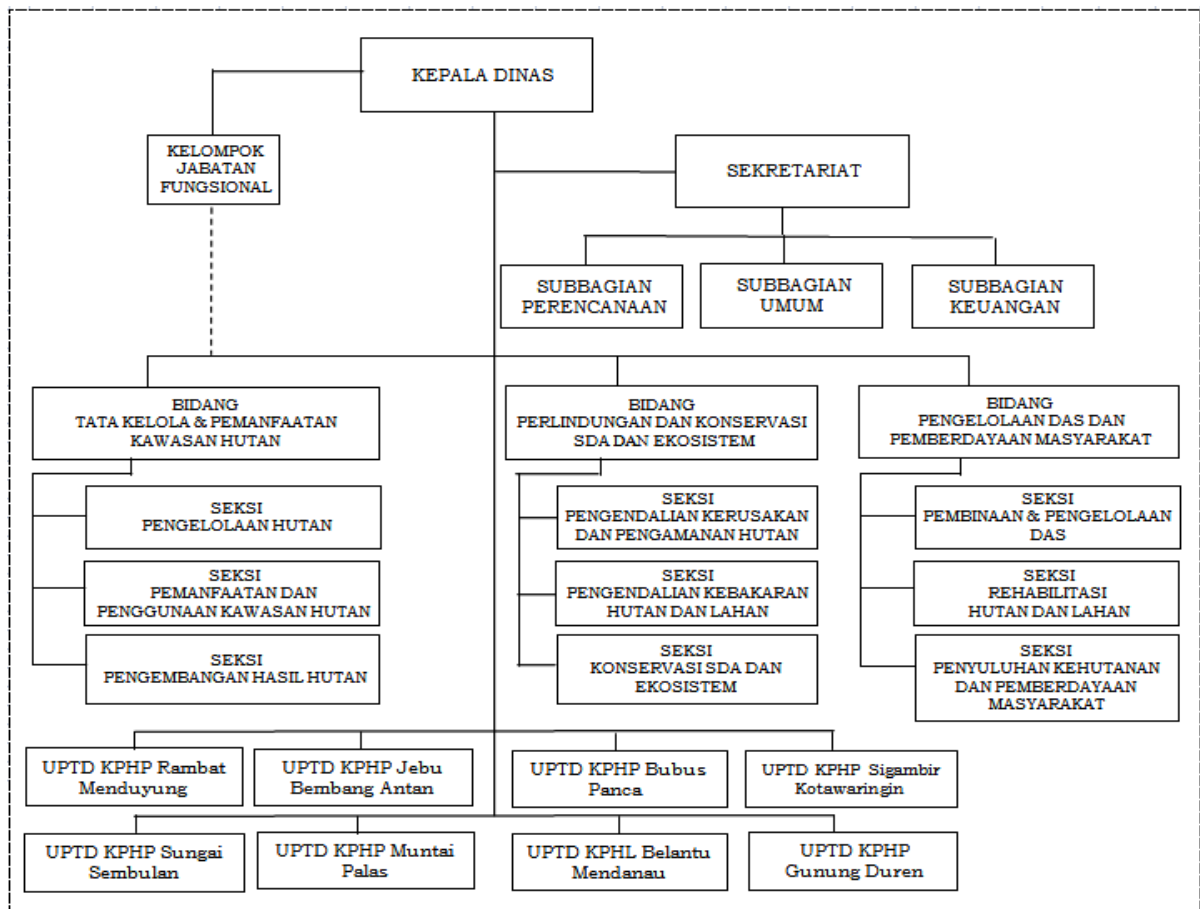
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 seri D);
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 4 seri D).

I.3 Struktur Organisasi

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, disusun Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana yang tertuang pada Bagan 1 berikut ini :

Bagan 1.

Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



I.4 Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Kehutanan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Kehutanan mempunyai fungsi :

- Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Kehutanan;
- Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Kehutanan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- Penyelenggaraan administrasi Dinas Kehutanan;
- Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Kehutanan; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

I.5. Sumber Daya Manusia

Pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2019 tercatat sebanyak 185 orang, terdiri dari 15 orang berpendidikan master/S2; 116 orang berpendidikan sarjana/S1; 17 orang Sarjana muda/D3; 36 orang berpendidikan SLTA; 1 orang berpendidikan SMP. Postur dan rincian data pegawai dapat dilihat pada Tabel 1

Tabel 1.
Klasifikasi Pegawai di Dinas Kehutanan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
	Berdasar Pendidikan			185
1	Doktoral/ S3	-	-	-
2	Pasca Sarjana/ S2	10	5	15
3	Sarjana / S1	82	35	116
4	Diploma-IV	-	-	-
5	Diploma-III	9	8	17
6	Diploma-I/ II	-	-	-
7	SLTA	5	31	36
8	SLTP	1	-	1
9	SD	-	-	-
	Berdasarkan Jabatan			185
10	Eselon II	1	-	1
11	Eselon III	10	2	12
12	Eselon IV	24	10	34
14	JFU	37	28	67
15	JFT	56	19	72

Sumber : Sub Bagian Umum Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

I.6 Sarana Prasarana

Sarana prasarana sangat dibutuhkan dalam menunjang kinerja pelayanan Dinas Kehutanan, dalam hal ini kebutuhan setiap pegawai dalam melaksanakan tugas rutin cukup terpenuhi, misalnya komputer sebagai alat bantu kerja yang utama. Kebutuhan akan listrik, telepon, faximili dan internet telah terpenuhi. Selain itu Dinas Kehutanan juga telah memiliki website dengan alamat www/dinhut.babelprov.go.id., yang tergabung dalam server Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (babelprov.go.id). Tabel 2 berikut menampilkan asset Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel 2
Rekapitulasi Buku Inventaris Milik Dinas Kehutanan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

No	Bidang Barang	NERACA (Rp) (Per 31 Des 2019)	Buku Inventaris (Rp) (Per 31 Des 2019)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5
I	Posisi BMD dalam Neraca (A+B)	12.330.998.212,85		0,00
A	ASET LANCAR	23.568.000,00		0,00
A.1	Persediaan	23.568.000,00		0,00
B	ASET TETAP	11.533.418.978,85		0,00
B.1	TANAH	181.588.442,90		0,00
B.2	PERALATAN DAN MESIN	13.646.860.468,09		0,00
B.2.1	Alat-alat Besar	6.160.000,00		0,00
B.2.2	Alat-alat Angkutan	5.572.673.828,58		0,00
B.2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	1.145.209.557,32		0,00
B.2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	280.940.000,00		0,00
B.2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	4.834.616.116,00		0,00
B.2.6	Alat-alat Studio dan Komunikasi	834.815.589,00		0,00
B.2.7	Alat-alat Kedokteran	0,00		0,00
B.2.8	Alat-alat Laboratorium	270.724.700,00		0,00
B.2.9	Alat-alat Keamanan	517.411.600,00		0,00
B.3	GEDUNG DAN BANGUNAN	8.067.588.076,80		0,00
B.3.1	Bangunan Gedung	7.918.102.076,00		0,00
B.3.2	Bangunan Monumen	149.486.000,00		0,00
B.4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	95.003.783.96		0,00
B.4.1	Jalan dan Jembatan	28.698.288,67		0,00
B.4.2	Bangunan Air / Irigasi	16.106.000,00	16.106.000,00	0,00
B.4.3	Instalasi	17.006.000,00	17.006.000,00	0,00
B.4.4	Jaringan	33.193.000,00	33.193.000,00	0,00
B.5	ASET TETAP LAINNYA	97.069.440,00	97.069.440,00	0,00
B.5.1	Buku Perpustakaan	92.384.440,00	92.384.440,00	0,00
B.5.2	Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan	4.685.000,00	4.685.000,00	0,00
B.5.3	Hewan Ternak dan Tumbuhan	0,00	0,00	0,00
B.5.4	Aset tetap Renovasi	0,00	0,00	0,00
B.6	KONSTRUKSI DALAM PENGKERJAAN	73.725.000,00	73.725.000,00	0,00
B.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	10.628.416.323,00	10.628.416.323,00	0,00
C	ASET LAINNYA	774.011.234,00	774.011.234,00	0,00
C.1	Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00

No	Bidang Barang	NERACA (Rp) (Per 31 Des 2019)	Buku Inventaris (Rp) (Per 31 Des 2019)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5
C.2	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00
C.3	Aset Lain-lain	774.011.234,00	774.011.234,00	0,00
C.4	Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain	0,00	0,00	0,00
II	BMD Non Neraca	632.002.392,80	632.002.392,80	0,00
A	BMD Ekstrakompitabel	632.002.392,80	632.002.392,80	0,00
	TOTAL (I+II)	13.005.145.605,65	13.005.145.605,65	

Sumber : Sub Bagian Umum Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

I.7 Sumber Pendanaan

Pada tahun anggaran 2019, Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada APBD murni mendapat alokasi dana sebesar Rp.31.803.062.946,95 meliputi Belanja Tidak Langsung Rp.20.739.419.796,95 dan Belanja Langsung Rp.11.063.643.150,00. Setelah perubahan (APBD-P) anggaran berubah menjadi sebesar Rp.38.222.793.873,00 yang meliputi Belanja Tidak Langsung Rp.23.873.111.973,00 dan Belanja Langsung Rp.14.349.681.900,00 yang diperuntukan bagi pelaksanaan 5 (lima) Program sebagaimana tertuang dalam Tabel 3 dan Tabel 4.

Tabel 3.

Pagu Anggaran APBD Dalam DPA Tahun 2019
Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	PROGRAM	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	TOTAL
1	2	3	4	5
1.	Belanja Pegawai	20.739.419.796,95	-	-
2.	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	-	4.678.298.500,00	-
3.	Program Peningkatan Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	-	2.179.693.650,00	-
4.	Program Peningkatan Perlindungan dan Konservasi SDA dan Ekosistem	-	1.220.127.000,00	-
5.	Program Peningkatan Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat	-	2.975.989.000,00	-
6.	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Tata Kelola Kehutanan	-	9.535.000,000	-
JUMLAH		20.739.419.796,95	11.063.643.150,00	31.803.062.946,95
		65,22%	34,78%	100,00%

Sumber : Sub Bagian Perencanaan Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019.

Tabel 4.
Pagu Anggaran APBD Dalam DPA Perubahan Tahun 2019
Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

NO	PROGRAM	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	TOTAL
1	2	3	4	5
1.	Belanja Pegawai	23.873.111.973,00	-	-
2.	Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah	-	5.065.792.054,00	-
3.	Program Peningkatan Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	-	2.079.235.096,00	-
4.	Program Peningkatan Perlindungan dan Konservasi SDA dan Ekosistem	-	1.629.120.000,00	-
5.	Program Peningkatan Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat	-	5.575.534.750,00	-
6.	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Tata Kelola Kehutanan	-	-	-
JUMLAH		23.873.111.973,00	14.349.681.900,00	38.222.793.873,00
		62,46%	37,54%	100,00%

Sumber : Sub Bagian Perencanaan Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

Dana atau anggaran (belanja langsung) yang tersedia untuk melaksanakan fungsi dan tugas Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selain sebagian besar berasal dari APBD, juga didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBN. Rincian anggaran yang dikelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan sumber pendanaan adalah sebagai berikut:

Tabel 5
Anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

SUMBER DANA	BESAR ANGGARAN (Rp)	PERSENTASE
1	2	3
APBD	38.222.793.973,00	98,77%
APBN	475.740.000,00	1,23%
TOTAL	38.698.533.673,00	100,00%

Sumber : Sub Bagian Perencanaan Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

A. Isu Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya adalah :

1. Masih rendahnya Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan;
2. Rendahnya penegakan hukum pidana Kehutanan;
3. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat Kehutanan melalui Perhutanan Sosial;
4. Masih rendahnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem;
5. Masih luasnya lahan kritis;
6. Masih rendahnya pengelolaan daerah aliran sungai (DAS);
7. Masih rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan di bidang Kehutanan;

BAB II**PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA****II.1 Perencanaan Strategis****II.1.1 Visi dan Misi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung**

Memperhatikan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen RPJPD 2005-2025 dan RPJMD 2017-2022, Visi Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 adalah :

“BABEL SEJAHTERA, PROVINSI MAJU YANG UNGGUL DI BIDANG INOVASI AGROPOLITAN DAN BAHARI DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFESIEN DAN CEPAT BERBASIS TEKNOLOGI”.

Tabel 6.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah Dinas Kehutanan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

VISI (RPJMD)	:	"BABEL SEJAHTERA, PROVINSI MAJU YANG UNGGUL DI BIDANG INOVASI AGROPOLITAN DAN BAHARI DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFESIEN DAN CEPAT BERBASIS TEKNOLOGI"		
MISI 1 (RPJMD)	:	MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS POTENSI DAERAH		
Tujuan Renstra	:	Sasaran Renstra	Strategi Renstra	Arah Kebijakan Renstra
Meningkatnya PDRB Sub Sektor Kehutanan		Meningkatnya produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu	Meningkatkan peran UPTD KPH dalam pengelolaan hutan untuk menghasilkan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu unggulan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan\ 2. Pemanfaatan Kawasan Hutan 3. Peningkatan produksi Hasil Hutan Kayu. 4. Peningkatan nilai Hasil Hutan Bukan Kayu. 5. Peningkatan pelayanan teknis UPTD KPH.
MISI 6 (RPJMD)	:	MENINGKATKAN PENGENDALIAN BENCANA DAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP		
Tujuan Renstra	:	Sasaran Renstra	Strategi Renstra	Arah Kebijakan Renstra
Menurunnya kerusakan hutan dan lahan	1	Menurunnya luas lahan kritis	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan melalui Pengembangan Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan Pegelolaan Daerah Aliran Sungai. 2. Rehabilitasi Hutan dan lahan 3. Pengembangan Perhutanan Sosial

VISI (RPJMD)	:	"BABEL SEJAHTERA, PROVINSI MAJU YANG UNGGUL DI BIDANG INOVASI AGROPOLITAN DAN BAHARI DENGAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFESIEN DAN CEPAT BERBASIS TEKNOLOGI"		
			Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Adat (HA) dan Kemitraan Kehutanan (KK)	4. Penyelenggaraan Penyuluh Kehutanan 5. Penumbuhan dan pengembangan kelompok pecinta alam/pramuka.
	2	Menurunnya luas kerusakan hutan dan lahan	Peningkatan penegakan hukum terhadap tindak pidana hutan	1. Penertiban Pelanggaran Tindak Pidana Kehutanan 2. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 3. Penetapan Kawasan Ekosistem Essensial

II.1.2 Tujuan Dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai visi misi ditunjukkan pada Tabel 7 berikut :

Tabel 7.

Tujuan Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	MISI	TUJUAN
1.	Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah	Meningkatnya PDRB Sub Sektor Kehutanan
6.	Meningkatkan Pengendalian Bencana dan Kualitas Lingkungan Hidup	Menurunnya kerusakan hutan dan lahan

Sumber : Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi, dan tujuan organisasi. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai.

Tabel 8.

Target Sasaran Kinerja dan Indikator RPJM Tahun 2011 s.d 2022
Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2019
1	2	3	4	6
1.	Meningkatnya produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu	Presentase izin usaha hasil hutan kayu	%	40
		Presentase hasil hutan bukan kayu yang dikembangkan	%	40
		Persentase Luas perubahan status kawasan hutan/TORA	%	40
		Presentase kawasan hutan yang dikelola	%	62.50
2.	Menurunnya luas lahan kritis	Presentase DAS kritis yang dikelola	%	9,11
		Presentase luas kawasan hutan yang bervegetasi	%	0.88
		Persentase luas kawasan Perhutanan Sosial	%	49.7
3.	Menurunnya kerusakan hutan dan lahan	Presentase luas kawasan ekosistem essensial	%	40
		Presentase penurunan luas kawasan hutan yang terbakar	%	80
		Persentase Penanganan tindak pidana Kehutanan	%	40
4.	Peningkatan pelayanan tata kelola kehutanan	Presentase pengelolaan hutan oleh UPTD KPH	%	62.5

Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah seperti dijelaskan pada tabel 9 Berikut:

Tabel 9.
Target capaian Sasaran Kinerja Dinas kehutanan 2017-2022

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2018	TARGET 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu	Presentase izin usaha hasil hutan kayu	%	20	40
		Presentase hasil hutan bukan kayu yang dikembangkan	%	20	40
		Persentase Luas perubahan status kawasan hutan/TORA	%	20	40
		Presentase kawasan hutan yang dikelola	%	50	62.50
2.	Menurunnya luas lahan kritis	Presentase DAS kritis yang dikelola	%	9,11	9,11
		Presentase luas kawasan hutan yang bervegetasi	%	0,88	0.88
		Persentase luas kawasan Perhutanan Sosial	%	32.92	49.7
3.	Menurunnya kerusakan hutan dan lahan	Presentase luas kawasan ekosistem essensial	%	20	40
		Presentase penurunan luas kawasan hutan yang terbakar	%	20	80
		Persentase Penanganan tindak pidana Kehutanan	%	20	40
4.	Peningkatan pelayanan tata kelola kehutanan	Presentase pengelolaan hutan oleh UPTD KPH	%	50	62.5

Sumber : Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

II.1.3 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah Kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Kehutanan mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien di dalam Rencana Strategis (Renstra). Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi dihasilkan dari posisi Strategis hasil analisa lingkungan yaitu S-O (*Strengths/kekuatan-Opportunity/peluang*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Dari analisa lingkungan strategis yang telah dilakukan maka didapatkan strategi Perangkat Daerah Dinas Kehutanan adalah sebagai berikut :

a. Sasaran 1. Meningkatnya produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu

Strategi yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran 1 adalah :

Meningkatkan peran UPTD KPH dalam pengelolaan hutan dalam menghasilkan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu unggulan.

Kebijakan yang ditempuh untuk mendukung pelaksanaan strategi ini adalah :

- a) Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan.
- b) Pemanfaatan Kawasan Hutan.
- c) Peningkatan produksi Hasil Hutan Kayu .
- d) Peningkatan nilai Hasil Hutan Bukan Kayu.
- e) Peningkatan pelayanan teknis UPTD KPH.

b. Sasaran 2. Menurunnya luas lahan kritis

Strategi yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran 2 adalah :

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan melalui Pengembangan Perhutanan Sosial dengan skema Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Adat (HA) dan Kemitraan Kehutanan (KK).

Kebijakan yang ditempuh untuk mendukung pelaksanaan strategi ini adalah :

- a) Pembinaan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.
- b) Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
- c) Pengembangan Perhutanan Sosial.
- d) Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan.
- e) Penumbuhan dan pengembangan kelompok pecinta alam/pramuka.

c. Sasaran 3. Menurunnya Luas Kerusakan Hutan dan Lahan

Strategi yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran 3 adalah :

Peningkatan penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan.

Kebijakan yang ditempuh untuk mendukung pelaksanaan strategi ini adalah :

- a) Penertiban Pelanggaran Tindak Pidana Kehutanan.
- b) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
- c) Penetapan kawasan ekosistem essensial.

Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan program dan kegiatan untuk mendukung tugas-tugas tersebut. Adapun program-program tersebut terdiri dari program utama (teknis) dan program pendukung (generik). Pejelasan program tersebut adalah :

a) Program Teknis

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama Dinas Kehutanan yang dimulai dari proses perencanaan, pemantauan, evaluasi, kajian dan koordinasi kebijakan pembangunan. Program ini berjumlah 4 (empat) program yaitu :

1. Program Peningkatan Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan;
2. Program Peningkatan Perlindungan dan Konservasi SDA dan Ekosistem;
3. Program Peningkatan Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat;
4. Program Peningkatan Pelayanan Teknis Tata Kelola Kehutanan.

b) Program Generik

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Dinas Kehutanan khususnya dalam peningkatan kapasitas kelembagaan baik dari aspek organisasi, tatalaksana, sarana dan prasarana, pengawasan dan lainnya. Program ini berjumlah 1 (satu) program yaitu Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah dan kegiatan berjumlah 6 (enam) kegiatan, yaitu 1. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, 2. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, 3. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, 4. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan, 5. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, 6. Kegiatan Penyusunan Sistem Database Kehutanan Berbasis IT.

II.1.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Dalam usaha untuk mencapai sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan indikator sasaran serta target capaian indikator sasaran yang ingin dicapai tiap tahun. Untuk tahun 2019 Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merencanakan target kinerja tahun 2019. Semua sasaran dan indikator sasaran yang ada dalam RKT sudah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Tabel 10
Rencana Kerja Tahunan 2019

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu	1. Presentase izin usaha hasil hutan kayu	40%	Program Peningkatan Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	2.079.235.096,00
	2. Presentase hasil hutan bukan kayu yang dikembangkan	40%	<u>Kegiatan :</u>	
	3. Persentase Persentase Luas perubahan status kawasan hutan/TORA	40%	1. Pemanfaatan Kawasan Hutan 2. Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu 3. Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Hutan	
	4. Presentase kawasan hutan yang dikelola	62.50%	4. Peningkatan Usaha Hasil Hutan Kayu 5. Expo Pengembangan dan Promosi Hasil Hutan 6. Pengadaan Kendaraan Roda Dua (R-2) UPTD KPH (DAK Kehutanan) 7. Pembangunan Sumber Benih dan Konservasi eksitu Gaharu dan Pelawan 8. Pembangunan Kantor Resort KPH (DAK)	

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Menurunnya luas lahan kritis	Presentase DAS Kritis yang dikelola	9,11%	Program Peningkatan Peneglolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat	5.575.534.750,00
	Presentase Luas Kawasan Hutan yang Bervegetasi	49.70%	<u>Kegiatan :</u> 1. Pembinaan Pengelolaan DAS 2. Pemenuhan Kewajiban Rehabilitasi DAS bagi Pemegang IPPKH 3. Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan 4. Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan 5. Rehabilitasi Hutan dan lahan 6. Pengembangan Perhutanan Sosial 7. Penumbuhan dan pengembangan kelompok pecinta alam/pramuka/siswa sekolah. 8. Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif (DAK) 9. Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Bubus Panca (DBH-DR Kehutanan) 10. Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Sigambir Kotawaringin (DBH-DR Kehutanan) 11. Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Muntai Palas (DBH-DR Kehutanan) 12. Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Rambat Menduyung (DBH-DR Kehutanan) 13. Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Jebu Bembang Antan (DBH-DR Kehutanan) 14. Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Belantu Mendanau (DBH-DR Kehutanan) 15. Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Gunung	
	Presentase Luas Kawasan Perhutanan Sosial	49.70%		

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Duren (DBH-DR Kehutanan) 16. Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Sungai Sembulan (DBH-DR Kehutanan)	
Menurunnya kerusakan hutan dan lahan	1. Presentase Luas Kawasan Ekosistem Essensial 2. Presentase Penurunan Luas kawasan Hutan yang Terbakar 3. Presentase Penanganan tindak pidana kehutanan	40% 80% 40%	Program Peningkatan Perlindungan dan Konservasi SDA dan Ekosistem	1.635.120.000,00
			<u>Kegiatan :</u> 1. Penerbitan Pelanggaran Tindak pidana Kehutanan 2. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 3. Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan 4. Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengamanan Hutan oleh Polhut 5. Tenaga Pendukung Polisi Hutan 6. Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Hutan Essensial 7. Penyelenggaraa Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH-Kehutanan)	
Peningkatan Pelayanan Tata Kelola Kehutanan	Presentase Pengelolaan Hutan oleh UPTD KPH	62.5%	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Tata Kelola Kehutan	9.535.000,00
			<u>Kegiatan :</u> 1. Penyelesaian usulan perubahan status perubahan kawasan hutan /TORA	

II.1. Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. Tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan tahun

Tabel 11.
Penetapan Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Tahun 2019

No	Sasaran	Indikator	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu	Presentase izin usaha hasil hutan kayu	20%	204,02%	40%	34.31%
		Presentase hasil hutan bukan kayu yang dikembangkan	20%	-	40%	88%
		Luas Perubahan status kawasan hutan/TORA	20%	-	40%	10.800%
		Presentase kawasan hutan yang dikelola	50 %	-	62.50%	6,57%
2.	Menurunnya lahan kritis	Presentase DAS kritis yang dikelola	9,11%	9,25%	9.11%	399,86%
		Presentase luas kawasan hutan yang bervegetasi	0,88%	2,64%	0.88%	27,21%
		Presentase luas	32,93%	89,80%	49,70%	27,31%

No	Sasaran	Indikator	Target 2018	Realisasi 2018	Target 2019	Realisasi 2019
1	2	3	4	5	6	7
		kawasan perhutanan sosial				
3	Menurunnya kerusakan hutan dan lahan	Presentase Luas Kawasan Ekosistem Essensial	20%	20%	40%	20%
		Presentase penurunan luas kawasan hutan yang terbakar	20%	25%	80%	83,59%
		Presentase penanganan tindak pidana kehutanan	20%	20%	40%	40%
4.	Peningkatan pelayanan Tata Kelola Kehutanan	Presentase pengelolaan hutan oleh UPTD KPH	50%	50,00%	62.5%	39,39%

Sumber : Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022

II.3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2019 Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 12
Anggaran Belanja Langsung Per-Sasaran Strategis Dinas Kehutanan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019

No	Sasaran	Anggaran DPA	Anggaran DPPA	Persenta se
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu	226.471.550,00	145.280.000,00	71,85
2.	Menurunnya kerusakan hutan dan lahan	212.932.000,00	156.032.000,00	97,63
3.	Meningkatnya pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	68.644.000,00	68.644.000,00	72,42
4.	Peningkatan pelayanan Tata Kelola Kehutanan	9.535.000,00	-	-
	Jumlah	517.582.550,00	369.956.000,00	100,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Pengukuran Kinerja

Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 13
Target kinerja dalam perjanjian kinerja Perangkat Daerah 2019

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target (%)
1.	Meningkatnya produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu	Presentase izin usaha hasil hutan kayu	40%
		Presentase hasil hutan bukan kayu yang dikembangkan	40%
		Presentase luas perubahan status kawasan hutan/TORA	40%
		Presentase kawasan hutan yang dikelola	62,50%
2.	Menurunnya luas lahan kritis	Presentase DAS kritis yang dikelola	9,11%
		Presentase luas kawasan hutan yang bervegetasi	0,88%
		Persentase luas kawasan Perhutanan sosial	49,7%
3.	Menurunnya kerusakan hutan dan lahan	Persentase luas kawasan ekosistem essensial	40%

		Presentase penurunan luas kawasan hutan yang terbakar	80%
		Persentase Penanganan tindak pidana kehutanan	40%
4.	Peningkatan pelayanan tata kelola kehutanan	Presentase pengelolaan hutan oleh UPTD KPH	62,5%

Tabel 14

Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja tahun 2019

N o.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Ket
1.	Meningkatnya produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu	Presentase izin usaha hasil hutan kayu	40%	34,31%	86%	Sangat Tinggi
		Presentase hasil hutan bukan kayu yang dikembangkan	40%	88%	220%	Sangat Tinggi
		Presentase luas perubahan status kawasan hutan/TORA	40%	10,80%	27%	tinggi
		Presentase kawasan hutan yang dikelola	62,50%	6,57%	10,51 %	rendah
2.	Menurunnya luas lahan kritis	Presentase DAS kritis yang dikelola	9,11%	399,86%	4.389,24%	Sangat Tinggi
		Presentase luas kawasan hutan yang bervegetasi	0,88%	27,21%	3.092,05%	Sangat Tinggi
		Persentase luas kawasan Perhutanan sosial	49,70%	27,31%	54,95 %	Sangat Tinggi
3.	Menurunnya kerusakan hutan dan lahan	Persentase luas kawasan ekosistem essensial	40%	20%	50%	Sangat Tinggi

		Presentase penurunan luas kawasan hutan yang terbakar	80%	83,59%	104,49 %	Sangat Tinggi
		Persentase Penanganan tindak pidana kehutanan	40%	40%	100%	Sangat baik
4.	Peningkatan pelayanan tata kelola kehutanan	Presentase pengelolaan hutan oleh UPTD KPH	62,5%	39,39%	62,99	Sangat Tinggi
	Total Rata-rata capaian sasaran				819,723	Sangat Tinggi

Tabel 15

Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019 Dengan Tahun 2018

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Capaian (%) 2018	Capaian (%) 2019	+/- (%)	Keterangan
1.	Meningkatnya produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu	Presentase izin usaha hasil hutan kayu	10,20%	86%	75,80 %	+
		Presentase hasil hutan bukan kayu yang dikembangkan	-	220%	220%	+
		Presentase luas perubahan status kawasan hutan/TORA	-	27%	27%	+
		Presentase kawasan hutan yang dikelola	-	105,20 %	105,20 %	+
2.	Menurunnya luas lahan kritis	Presentase DAS kritis yang dikelola	2,02%	4389,24%	41.79	+
		Presentase luas kawasan hutan yang bervegetasi	3%	3.103,41%	3.100,41	+

		Persentase luas kawasan Perhutanan sosial	2,73%	54,95 %	52,22 %	+
3.	Menurunnya kerusakan hutan dan lahan	Persentase luas kawasan ekosistem essensial	100%	50%	50%	-
		Presentase penurunan luas kawasan hutan yang terbakar	1,25%	104,49 %	103,24 %	+
		Persentase Penanganan tindak pidana kehutanan	100%	100%	100%	tetap
4.	Peningkatan pelayanan tata kelola kehutanan	Presentase pengelolaan hutan oleh UPTD KPH	100%	63,02 %	99,37	-

Tabel 16

Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan Target dalam Renstra 2017-2022

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Renstra 2019	Realisasi (%) 2019	Keterangan
1.	Meningkatnya produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu	Presentase izin usaha hasil hutan kayu	40%	34,31%	Tidak Tercapai
		Presentase hasil hutan bukan kayu yang dikembangkan	40%	88%	Tercapai
		Presentase luas perubahan status kawasan hutan/TORA	40%	10,80%	Tidak Tercapai
		Presentase kawasan hutan yang dikelola	62,50%	6,57%	Tidak Tercapai
2	Menurunnya luas lahan kritis	Presentase DAS kritis yang dikelola	9,11%	399,86%	Tercapai
		Presentase luas kawasan hutan yang bervegetasi	0,88%	27,21%	Tercapai

		Persentase luas kawasan Perhutanan sosial	49,70%	27,31%	Tidak Tercapai
3	Menurunnya kerusakan hutan dan lahan	Persentase luas kawasan ekosistem essensial	40%	20%	Tidak Tercapai
		Presentase penurunan luas kawasan hutan yang terbakar	80%	83,59%	Tercapai
		Persentase Penanganan tindak pidana kehutanan	40%	40%	Tercapai
4	Peningkatan pelayanan tata kelola kehutanan	Presentase pengelolaan hutan oleh UPTD KPH	62,5%	39,39%	Tidak Tercapai

Tabel 17

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai.

No.	Sasaran	Indikator kinerja	Target 2019	Realisasi Capaian Kinerja	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Efisiensi	% Efisiensi
1.	Meningkatnya produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu	Presentase izin usaha hasil hutan kayu	40%	86%	Program Peningkatan Tata kelola dan Pemanfaatan kawasan hutan	2.079.635.096,00	1.948.857.461,98	130.777.634,02	6,29%
		Presentase hasil hutan bukan kayu yang dikembangkan	40%	220%	Kegiatan Pemanfaatan kawasan hutan	54.889.150,00	44.930.250,00	9.958.900,00	18,1% ⁴
		Presentase luas perubahan status kawasan hutan/TORA	40%	27%	Pengembangan hasil hutan bukan kayu	145.280.000,00	103.995.100,00	41.284.900,00	0,28%
		Presentase kawasan hutan yang dikelola	62,50 %	105,20%	Penyusunan Rencana Pengelolaan kawasan hutan	100.625.000,00	99.458.600,00	1.166.400,00	1,16%
					Peningkatan usaha hasil hutan kayu	47.312.000,00	46.889.200,00	422.800,00	0,89%

					Expo pengembangan dan Promosi hasil hutan	331.529.946,00	331.191.746,00	338.200,00	0,10%
					Pengadaan kendaraan Roda dua (R-2) UPTD KPH (DAK Kehuanan)	200.000.000,00	165.182.500,00	34.817.500,00	17,4%1
					Pembangunan sumber benih dan konservasi exsitu Gaharu dan Pelawan	212.315.000,00	211.046.500,00	1.268.500,00	0,60%
					Pembangunan kantor Resort KPH (DAK)	987.684.000,00	946.163.565,98	41.520.434,02	4,20%
2	Menurunnya luas lahan kritis	Presentase DAS kritis yang dikelola	9.11 %	4.389,24 %	Program Peningkatan Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat	5.575.534.750,00	3.206.572.633,00	2.368.962.117,00	42,49
		Presentase luas kawasan hutan yang bervegetasi	0.88 %	3.103,41 %	Pembinaan Pegelolaan Daerah Aliran Sungai	68.644.000,00	49.711.500,00	18.932.500,00	27,58
		Persentase luas kawasan Perhutanan Sosial	49,70 %	54,95%	Pemenuhan Kewajiban Rehabilitasi DAS bagi Pemegang IPPKH	2.555.000,00	2.330.000,00	225.000,00	8,81
					Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	82.830.000,00	61.104.400,00	21.725.600,00	26,23

					Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan	158.492.000,00	135.878.700,00	22.613.300,00	14,27
					Rehabilitasi Hutan dan Lahan	415.906.000,00	341.433.500,00	74.472.500,00	17,91
					Pengembangan Perhutanan Sosial	422.562.000,00	243.628.291,00	178.933.709,00	42,34
					Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif (DAK)	2.225.000.000,00	497.478.631,00	1.727.521.369,00	77,64
					Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DBH-DR Kehutanan)	299.165.750,00	227.910.750,00	71.255.000,00	23,82
					Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Bubus Panca (DBH-DR kehutanan)	103.355.000,00	92.703.500,00	10.651.500,00	10,31
					Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Sigambir Kotawaringin (DBH-DR kehutanan)	55.895.000,00	-	55.895.000,00	-
					Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Sungai Sembulan (DBH-DR Kehutanan)	342.000.000,00	278.976.775,00	63.023.225,00	-
					Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Muntai Palas (DBH-DR Kehutanan)	193.670.000,00	167.489.379,00	26.180.621,00	-

					Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Rambat Menduyung (DBH-DR Kehutanan)	122.745.000,00	111.030.000,00	11.715.000,00	-
					Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Jebu Bembang Antar (DBH-DR Kehutanan)	237.245.000,00	214.391.100,00	22.853.900,00	-
					Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Belantu Mendanau (DBH-DR Kehutanan)	430.195.000,00	397.445.664,00	32.749.336,00	-
					Rehabilitasi Hutan dan Lahan di KPHP Gunung Duren (DBH-DR Kehutanan)	415.275.000,00	385.060.443,00	30.214.557,00	0,7%
3.	Menurunnya kerusakan hutan dan lahan	Presentase luas kawasan ekosistem essensial	40%	50%	Program Peningkatan Perlindungan dan Konservasi SDA Dan Ekosistem	1.635.120.000,00	1.561.253.860,00	73.866.140,00	4,52%
		Presentase penurunan luas kawasan hutan yang terbakar	80%	104,49%	Penertiban Pelanggaran Tindak Pidana Kehutanan	23.560.000,00	2.080.000,00	21.480.000,00	91,17%
		Persentase penanganan tindak pidana kehutanan	40%	100%	Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	156.032.000,00	152.337.000,00	3.695.000,00	2,37%

					Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan	307.160.000,00	305.480.000,00	1.680.000,00	0,55%
					Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengamanan Hutan oleh POLHUT	186.740.000,00	181.486.600,00	5.253.400,00	2,81%
					Tenaga Pendukung Polisi Hutan	500.980.000,00	492.883.600,00	8.096.400,00	1,62%
					Identifikasi dan Inventarisasi Kawasan Ekosistem Essensial	30.755.000,00	23.555.000,00	7.200.000,00	23,41%
					Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengamanan Hutan (DBH-Kehutanan)	429.893.000,00	403.431.660,00	26.461.340,00	6,16%
4.	Peningkatan pelayanan Tata Kelola Kehutanan	Presentase pengelolaan hutan oleh UPTD KPH	62.5 %	63,02%	Program Peningkatan Pelayanan Teknis Tata Kelola Kehutanan	9.535.000,00	-	-	-
					Penyelesaian Usulan Perubahan Status Kawasan Hutan/TORA	9.535.000,00	-	-	-

Tabel 18

Analisis Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja

1. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi (%) 2019	Capaian	Ket
1.	Meningkatnya pelayanan pemerintah	Predikat nilai SAKIP Perangkat Daerah	100%	100%	100 %	Tercapai
2.		Presentase Penyelenggaraan Dinas Kehutanan	100%	100%	100%	Tercapai
	Peningkatan Pembangunan Demokrasi	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target diatas 90%	95%	95%	100%	Tercapai
		Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah Daerah diatas 85%	95 %	95%	100%	Tercapai
		Tersedianya dan beroperasinya sistem informasi pembangunan Kehutanan berbasis Teknologi Informasi	12 Bulan	12 Bulan	100%	Tercapai
	Peningkatan Pelayanan Aparatur Pemerintah	Presentase Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat Kapasitasnya	100%	100%	100%	Tercapai
	Peningkatan Pembangunan Demokrasi	Jumlah laporan capaian kinerja dan keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi target di atas 90%	95%	95%	100%	Tercapai

Tabel 19

2. Target dan capaian kinerja kegiatan

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi (%) 2019	Capaian	Ket
1.	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah aparatur perangkat daerah yang terlayani selama 12 bulan	100%	100%	100%	Tercapai
2.	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Jumlah aparatur perangkat daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	Tercapai
	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah aparatur perangkat daerah yang meningkat kapasitasnya	25 Orang	25 Orang	25 Orang	Tercapai
	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap perencanaan jangka menengah perangkat daerah diatas 85%	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	Tercapai
	Tersusunnya Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja dan laporan keuangan perangkat daerah dengan realisasi target diatas 90%	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	Tercapai
		Jumlah Aplikasi sistem data base kehutanan berbasis IT di Dinas Kehutanan	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	Tercapai

Tabel 20

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai realisasi	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode Warna
1	2	3	4
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	
3.	$66 \leq 75$	Sedang	
4.	$51 \leq 65$	Rendah	
5.	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Kehutanan beserta target capaian realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada tabel 14 berikut:

Tabel 21
Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE (%)	KRITERIA / KODE
1	2	3	4	5	6	7	9
1	Meningkatnya produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu	Presentase izin usaha hasil hutan kayu	%	40.00	34.31	86	Tinggi
		Presentase hasil hutan bukan kayu yang dikembangkan	%	40.00	88	220	Sangat Baik
		Luas Perubahan status kawasan hutan/TORA	%	40.00	10.800	27	Sangat Rendah
		Presentase kawasan hutan yang dikelola	%	62.50	65,75	105,20	Sangat Baik
2	Menurunnya luas lahan kritis	Presentase DAS kritis yang dikelola	%	9.11	399,86	4.389,24	Sangat Baik

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE (%)	KRITERIA / KODE
1	2	3	4	5	6	7	9
		Presentase luas kawasan hutan yang bervegetasi	%	0.88	27,21	3.103,41	Sangat Baik
		Presentase luas kawasan perhutanan sosial	%	49,70	27,31	54,95	Rendah
3	Menurunnya kerusakan hutan dan lahan	Presentase luas kawasan ekosistem essensial	%	40	20	50	Rendah
		Presentase penurunan luas kawasan hutan yang terbakar	%	80	83,59	104,49	Sangat Baik
		Presentase penanganan tindak pidana kehutanan	%	40	40	100	Sangat Baik
5	Peningkatan pelayanan Tata Kelola Kehutanan	Presentase pengelolaan hutan oleh UPTD KPH	%	62.50	39,39	63,02	Rendah

Sumber : Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan uraian pada Tabel 14 diatas, maka rangkuman hasil pengukuran terhadap seluruh indikator kinerja sasaran, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 22
Rangkuman Hasil Pengukuran Kinerja

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Kinerja	Rata-rata Capaian Kinerja	Predikat
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu	4	109,49	Sangat Baik
2.	Menurunnya luas lahan kritis	3	151,49	Sangat Baik
3	Menurunnya kerusakan hutan dan lahan	3	84,83	Sangat Baik
4.	Peningkatan pelayanan teknis tata kelola kehutanan	1	63,02	Rendah

Tabel 15 diatas menunjukkan 11 (sebelas) indikator dengan predikat sangat rendah, Secara keseluruhan sasaran strategis termasuk dalam kriteria sangat rendah sesuai dengan Permendagri Nomor 54 tahun 2010.

III.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pencapaian sasaran strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun analisis dan evaluasi secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

Sasaran 1 : "Meningkatnya Produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu, capaian 109,49% (Sangat Baik)

Nilai tinggi diperoleh dari Hasil hutan kayu data awal sebesar 3.960 m³, sampai tahun 2019 capaian 10,463 m³". Terdapat 4 (empat) indikator kinerja yaitu : 1. Presentase izin usaha hasil hutan kayu, 2. Presentase hasil hutan bukan kayu yang dikembangkan, 3. Luas perubahan status kawasan hutan/TORA, 4. Presentase kawasan hutan yang dikelola.

Indikator kinerja "hasil hutan bukan kayu yang dikembangkan", terpenuhi target yang ditetapkan, berupa nilai hasil hutan yang diperdagangkan, demikian juga indikator

kinerja “perubahan status kawasan hutan/TORA” juga belum menyumbang realisasi, karena proses penetapan belum final.

Meskipun diperoleh rendah, perlu dilaksanakan kembali review terhadap capaian yang belum terpenuhi atau, melalui kajian yang lebih mendalam untuk penilaian kembali target indikator yang akan dilaksanakan.

Sasaran 2 : “Menurunnya Luas Lahan Kritis, capaian 151,49% (Sangat Baik)

Tolok ukur capaian sasaran Menurunnya Luas Lahan Kritis, terdiri dari 4 (empat) indikator yaitu: 1. Presentase DAS kritis yang dikelola, 2. Presentase luas kawasan hutan yang bervegetasi, 3. Presentase luas kawasan perhutanan sosial, 4. Presentase luas kawasan ekosistem essensial.

Perlu upaya lebih dan penerapan inovasi yang kreatif serta mengajak berbagai pihak untuk lebih mengelola hutan dan lahan dalam rangka perbaikan lingkungan melalui pengurangan lahan. Luas lahan kritis (kriteria kritis ditambah sangat kritis) pada tahun 2019 mencapai 20.688 hektar (Review Lahan Kritis Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018, BPDAS Baturusa Cerucuk).

Optimalisasi atas izin Perhutanan Sosial yang telah diterbitkan, dengan mempercepat upaya mengelola lahan yang menjadi kewenangannya dengan melaksanakan penanaman, khususnya pada lahan yang sudah terbuka. Serta penetapan kawasan lindung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat diupayakan untuk menjaga lingkungan dengan pemanfaatan sesuai kapasitasnya.

Mengoptimalkan fungsi 8 UPTD KPH yang telah beroperasi di semua wilayah Kabupaten di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga tercipta garis koordinasi yang tepat dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Meningkatkan sinergitas kegiatan-kegiatan Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terutama BKSDA Resort Bangka dan Resort Belitung.

Sasaran 3 : “Menurunnya kerusakan hutan dan lahan, capaian 84,83% (Sangat Baik)”.

Tolok ukur capaian sasaran menurunnya kerusakan hutan dan lahan, terdiri dari 1 (dua) indikator yaitu 1. Presentase penurunan luas kawasan hutan yang terbakar, 2. Persentase penanganan tindak pidana kehutanan.

Kondisi cuaca yang masih sering hujan di tahun 2019, dan upaya bersama berbagai pihak, misal BPBD, Kepolisian, TNI AD serta kesadaran masyarakat yang meningkat, tetapi kejadian kebakaran yang dilaporkan masih seluas 4.000 hektar, sangat jauh dari prediksi kejadian yang diperkenankan di tahun 2019 yaitu 3.196 hektar.

Penegakan hukum pidana kehutanan dilaksanakan dengan skala prioritas dan pemilihan penanganan yang memberikan dampak/efek jera bagi para pelanggar, mampu memberikan pesan yang jelas dan tegas, meskipun terdapat keterbatasan personil dan anggaran dan tingginya aktivitas illegal di dalam kawasan hutan untuk tambang dan perambahan. Kerjasama dengan APH melalui *cost sharing* dalam penegakan hukum memberikan hasil yang baik dengan terpenuhinya capaian kegiatan.

Sasaran 4 : "Peningkatan pelayanan Tata Kelola Kehutanan, capaian 63,02% (Rendah)".

Tolok ukur capaian sasaran Peningkatan Pelayanan Tata Kelola Kehutanan, terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu 1. Presentase pengelolaan hutan oleh UPTD.

KPH merupakan pelakasa penyelenggaraan manajemen pengelolaan hutan di tingkat tapak/lapangan, penyelenggaraan hutan untuk mencapai kelestarian hutan. Pengelolaan hutan mencakup : Tata hutan, Penyusunan rencana pengelolaan hutan, Pemanfaatan hutan, Rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan Perlindungan dan konservasi alam.

Sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.797/MENHUT-II/2009 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ditetapkan 13 unit KPH, terdiri dari 2 unit KPHL dan 11 unit KPHP.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 98 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dibentuk UPTD Kehutanan sebanyak 8 (delapan) unit terdiri dari 7 (tujuh) KPHP dan 1 (satu) KPHL.

Menjadi tantangan untuk penyelenggaraan kehutanan melalui KPH, dengan harapan yang sangat tinggi untuk terwujudnya pemanfaatan hutan namun tetap mengedepankan kelestarian, serta terwujudnya peningkatan taraf ekonomi

III.3 Akuntabilitas Keuangan

Realisasi penggunaan anggaran untuk terlaksananya pencapaian program/kegiatan disampaikan sebagai berikut :

1. Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2019 sebesar 90,82% dari total anggaran yang dialokasikan Rp.38.240.393.873,00 Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 98,65 % sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 77,83 %, Jika dilihat dari realisasi anggaran per-sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan Peningkatan Perlindungan dan Konservasi SDA dan Ekosistem (95,48%) sedangkan penyerapan terkecil pada program/kegiatan Peningkatan Tata Kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan (93,71%);
2. Program/kegiatan Peningkatan Pelayanan Teknis Tata Kelola Kehutanan (100%), dengan Anggaran sebesar Rp.2.079.635.096,00 realisasi anggaran sebesar Rp.1.948.857.461,94 atau 93,71% dengan realisasi kegiatan fisik sebesar 100,00%. Keluaran kegiatan ini adalah terselenggaranya pengelolaan hutan yang intensif untuk mencapai kelestarian hutan dengan hasil kegiatan Hutan terkelola sehingga terwujudnya kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat;
3. Program/kegiatan Peningkatan Perlindungan dan Koservasi dan Ekosistem (100%) dengan Anggaran sebesar Rp.1.635.120.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.1.561.253.860,00 atau 95,48%, dengan realisasi fisik 100,00% keluaran kegiatan ini adalah terselenggaranya Perlindungan dan Pegamanan Hutan untuk mencapai kelestarian hutan;
4. Program/kegiatan Peningkatan Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarkat (100%) dengan Anggaran sebesar Rp.5.575.534.750,00 realisasi anggaran sebesar Rp.3.206.572.633,00 atau 94,98% dengan realisasi fisik 100,00%, keluaran kegiatan ini adalah terwujudnya Pengelolaan DAS yang sehat, terkelolanya HKM, HTR,HD, dan rehabilitasi berkurangnya lahan kritis.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel 20 berikut:

Tabel 23.
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Per Sasaran Tahun 2019

No	Sasaran	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan Tata kelola dan Pemanfaatan Kawasan Hutan	11,53	60,00	60,00	2.079.635.096,00	1.948.857.461,98	93,71
2	Peningkatan Perlindungan dan Konservasi SDA Dan Ekosistem	15,01	90,00	90,00	1.635.120.000,00	1.561.253.860,00	95,48
3	Peningkatan Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat	13,29	65,00	65,00	5.575.534.750,00	3.206.572.633,00	94,98
5	Peningkatan Pelayanan Teknis Tata Kelola Kehutanan	-	-	-	-	-	-
Jumlah					9.290.635.096,00	6.716.683.955,00	
Belanja Langsung Pendukung					14.367.281.900,00	11.181.377.242,98	
Total Belanja Langsung					23.179.569.026	14.875.039.337	

Sumber: Data Olahan Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Capaian realisasi keuangan program/kegiatan yang menunjang sasaran Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara keseluruhan baik. Selain faktor kecermatan dalam perencanaan anggaran, ketepatan waktu memulai, melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan serta kerjasama dalam melaksanakan kegiatan sangat menentukan keberhasilan untuk meningkatkan capaian realisasi keuangan di masa mendatang.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2019, serta Penetapan Kinerja Tahun 2019 yang berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kehutanan Tahun 2017-2022 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan atas penggunaan anggaran. dalam penyusunan laporan kinerja berdasarkan fakta sehingga dapat memberikan gambaran nyata atas pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (empat) sasaran, ditetapkan dengan 11 (sebelas) indikator kinerja, realisasi fisik termasuk dalam kategori sangat rendah terdapat 4 sasaran pada 11 (sebelas) indikator kinerja dengan nilai 1,095, 22,22, 0,85, dan 0,63 (sangat rendah). Tingkat keberhasilan yang belum tercapai ini perlu ditingkatkan kinerja dan partisipasi semua pihak yang terkait semoga ditahun yang akan datang mendapatkan tingkat keberhasilan yang sangat baik.

Sementara itu, untuk target-target dalam indikator yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan untuk tahun yang akan datang.

Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.